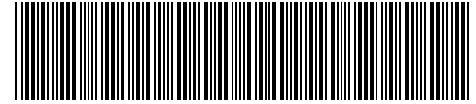




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.648994/2024**



DS:1372-9053-9685-7100

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**Revisi ke 01**

Tanggal : 16 Februari 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
3. Provinsi : (29) BANTEN
4. Kode>Nama Satker : (648994) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
- Sebesar : Rp. 498.635.000 ( EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi  
013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 498.635.000  
Rp. 498.635.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	498.635.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN S E R A N G (020) Rp. 498.635.000

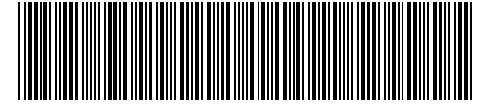
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.648994/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1372-9053-9685-7100

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (29) BANTEN  
Kode>Nama Satker : (648994) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			498.635.000
Kegiatan	:	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			498.635.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan			
		2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	34,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	439.281.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	34,00	Rekomendasi Kebijakan	439.281.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	12,00	Orang	59.354.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	12,00	Orang	59.354.000

Jakarta, 24 November 2023

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.

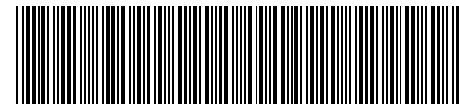
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : DIPA- 013.08.2.648994/2024**

**I B. SUMBER DANA**



DS:1372-9053-9685-7100

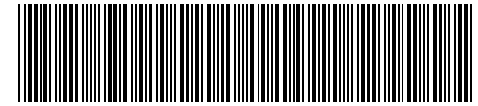
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
 Provinsi : (29) BANTEN  
 Kode>Nama Satker : (648994) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	498.635.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	498.635.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.648994/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1372-9053-9685-7100

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (29) BANTEN  
Kode>Nama Satker : (648994) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648994	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN	-	498.635	-	-	-	498.635		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	498.635	-	-	-	498.635		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	498.635	-	-	-	498.635		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (29.53 BANTEN / KOTA SERANG)	-	439.281	-	-	-	439.281	29 . 53	
01	RM	-	439.281	-	-	-	439.281	020	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (29.53 BANTEN / KOTA SERANG)	-	59.354	-	-	-	59.354	29 . 53	
01	RM	-	59.354	-	-	-	59.354	020	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>498.635</b>	-	-	-	<b>498.635</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.648994/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1372-9053-9685-7100

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (29) BANTEN  
Kode>Nama Satker : (648994) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

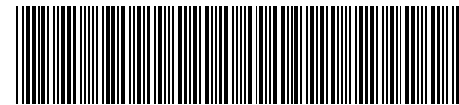
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	648994	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	19.999	90.070	35.090	61.499	56.315	62.850	64.650	47.560	46.890	13.342	370	0	498.635
		<b>BELANJA BARANG</b>	19.999	90.070	35.090	61.499	56.315	62.850	64.650	47.560	46.890	13.342	370	0	498.635
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	19.999	90.070	35.090	61.499	56.315	62.850	64.650	47.560	46.890	13.342	370	0	498.635
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	19.999	90.070	35.090	61.499	56.315	62.850	64.650	47.560	46.890	13.342	370	0	498.635

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.648994/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:1372-9053-9685-7100

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : [29] BANTEN  
Kode dan Nama Satker : [648994] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

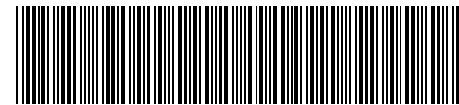
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.648994/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:1372-9053-9685-7100

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : [29] BANTEN  
Kode dan Nama Satker : [648994] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001